

Proses Lelang Jabatan di Pemkot Cilegon Dinilai Terlalu Lambat

CILEGON (IM)- Anggota DPRD Kota Cilegon, Rahmatulloh menyebut lelang jabatan eselon dua terlalu lambat. Rahmatulloh mempertanyakan performa Panitia Seleksi (Pansel) lelang jabatan tinggi Pemkot Cilegon tersebut. "Terlalu lambat, hasil pansel ini emangnya akan menghasilkan SDM seperti apa kualitasnya?" ujar Rahmatulloh, Senin (16/10).

Rahmatulloh bahkan menyinggung soal kualitas SDM yang akan dilahirkan dari proses lelang tersebut. "Hasilnya akan segitu-gitu juga kok, Saya sudah bisa membaca kualitasnya ketika diundang DPRD untuk melakukan hearing dengan komisi atau dengan Badan Anggaran juga sebatas itu saja kemampuannya," paparnya.

Bahkan jika beradu argumen dengan DPRD, lanjut Rahmatulloh, banyak juga yang tidak bisa menjelaskan dengan keilmuannya atau dengan bidang yang digawangi.

Diketahui, Pemkot Cilegon saat ini sedang melelang sejumlah jabatan eselon dua atau kepala OPD. Pemkot Cilegon sedang melakukan open bidding terhadap sejumlah jabatan kepala OPD.

Di antaranya, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Kemudian, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Kepala Dinas Pemuda Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar), Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).

Selanjutnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Sampai saat ini proses seleksi belum selesai.

Padahal jika mengacu pada agenda tahapan seleksi yang telah ditetapkan oleh Pansel, seharusnya seluruh tahapan selesai pada Juli 2023.

Diketahui seluruh tahapan seleksi telah selesai, dan saat ini tinggal menunggu Pansel menetapkan tiga besar untuk masing-masing jabatan yang dilelang. ● pra



PERTANIAN PERKOTAAN ALTERNATIF KETAHANAN PANGAN BERKELANJUTAN

Dua pekerja merawat tanaman sayur kol di kebun Kelompok Wanita Tani Anthurium, Karawaci, Kota Tangerang, Senin (16/10). Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional mendorong pemanfaatan pertanian perkotaan atau urban farming sebagai alternatif penyedia pangan murah berkualitas yang dapat menjaga ketahanan pangan dan memenuhi gizi masyarakat kota.

Kabupaten dan Kota Tangerang Masuk Daftar Rawan Pemilu

Berdasarkan hasil identifikasi KPU bersama dengan Intelkam Polri, wilayah Kota dan Kabupaten Tangerang memiliki indikator kurang aman, rawan, sangat rawan pada penyelenggaraan Pemilu. Bahkan wilayah pesisir Pantai Tangerang Utara (Pantura), termasuk dalam area yang memerlukan antisipasi khusus dari gangguan kondusifitas penyelenggaraan Pemilu.

TANGERANG (IM)- Daerah Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang masuk dalam kategori rawan saat penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024

mendatang. Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan, Tangerang dikategorikan rawan Pemilu merupakan hasil identifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Intelijen dan Kemanan (Banintelkam) Polri. "Berdasarkan hasil identifikasi KPU bersama dengan Intelkam Polri, wilayah Kota dan Kabupaten Tangerang memiliki indikator kurang aman, rawan, sangat rawan pada penyelenggaraan Pemilu," katanya, Senin (16/10).

Zain menjelaskan, terdapat beberapa indikator yang membuat wilayah hukumnya tersebut masuk dalam

kategori rawan gangguan kondusifitas atau keriuhan. Mulai dari praktik politik praktis, hingga tindakan-tindakan yang dapat berakibat gangguan ketertiban umum. Namun, Zain tidak memaparkan secara rinci wilayah yang cukup rawan terjadi bentrokan antar tim pemenangan calon yang akan berkompetisi di kontestasi Pemilu 2024 tersebut. "Tentunya untuk di wilayah kita rawan," ucapnya.

Wilayah pesisir Pantai Tangerang Utara (Pantura) disebutnya, masuk dalam area yang memerlukan antisipasi khusus dari gangguan kondusifitas penyelenggaraan Pemilu. "Yang jelas jelang pelaksanaan pengamanan pemilu tentunya kita berharap di wilayah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan khususnya pantura bisa berjalan aman," ungkapnya.

Menurut Zain, proses pengamanan akan dilaksanakan sejak pelaksanaan kampanye, sampai sampai hari penghitungan suara. Oleh karena itu, pihaknya telah mengundang sejumlah pimpinan partai politik di Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang untuk berkonsolidasi menciptakan Pemilu yang aman.

"Sehingga ini mampu mendinginkan situasi untuk menciptakan kamtibmas yang aman dan kondusif," pungkaskannya. ● pp

naan pengamanan pemilu tentunya kita berharap di wilayah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan khususnya pantura bisa berjalan aman," ungkapnya.

Menurut Zain, proses pengamanan akan dilaksanakan sejak pelaksanaan kampanye, sampai sampai hari penghitungan suara. Oleh karena itu, pihaknya telah mengundang sejumlah pimpinan partai politik di Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang untuk berkonsolidasi menciptakan Pemilu yang aman.

"Sehingga ini mampu mendinginkan situasi untuk menciptakan kamtibmas yang aman dan kondusif," pungkaskannya. ● pp

MINTA SOLUSI WALI KOTA

DPRD Tangsel Soroti PHK Besar-besaran

TANGSEL (IM)- DPRD Kota Tangsel menyoroti adanya Keputusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran yang terjadi di tahun ini. Melalui Rapat Paripurna yang digelar Senin (16/10), sejumlah fraksi di DPRD Tangsel dalam pandangan umumnya menyoroti ribuan tenaga kerja telah di-PHK.

Dewan meminta Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie mencari solusi atas persoalan ini. Fraksi Partai Golkar mengkritik PHK.

PHK besar-besaran yang terjadi di Tangsel akan berdampak pada angka proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2024, yang telah disepakati pada angka 5,67 persen sampai 5,87 persen.

"Untuk itu kami berharap Pemkot Tangsel perlu melakukan langkah-langkah strategis, di mana program hubungan industrial dan program penempatan tenaga kerja dapat dilaksanakan secara optimal," ungkap anggota DPRD Fraksi Golkar, Muhammad Robert Usman.

Selain itu, di awal Oktober tahun 2023 ini juga telah terjadi kenaikan harga bahan pokok, terutama beras yang akan memicu kenaikan harga barang dan jasa serta akan berdampak pada kemungkinan terjadinya inflasi.

"Oleh karena itu dalam penyusunan RAPBD Tahun 2024 kami mengingatkan kepada Pemkot Tangsel untuk mempersiapkan langkah-langkah strategis terhadap kenaikan

kan harga bahan pokok di atas," jelasnya.

Sementara itu Fraksi Demokrat menyatakan, persoalan PHK ini terjadi karena adanya deadlock pembahasan mengenai Upah Minimim Kabupaten/Kota atau UMK.

"Pemkot Tangsel harus dapat menjembatani persoalan tersebut," ujar juru bicara Fraksi Demokrat, Rizki Jonis.

Fraksi PSI dalam pandangan umumnya mengatakan, angka PHK tahun ini cukup tinggi. Diprediksi gelombang PHK akan terus berlanjut hingga akhir tahun 2023 dan berlanjut ke tahun 2024.

PHK ini sendiri terjadi di berbagai sektor, baik sektor pendidikan, kesehatan dan juga sektor swasta.

"Kami berharap Pemkot Tangsel telah mempersiapkan rencana dalam mengantisipasi gelombang PHK di tahun 2024, Mohon tanggapan Walikota Tangsel," ujar Christian.

Sementara itu Fraksi PKB menilai belum melihat adanya keseriusan Pemkot Tangsel dalam merencanakan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), peningkatan kesempatan kerja, serta penanggulangan kemiskinan di Kota Tangsel.

"Yang mana hal tersebut menjadi mandat yang penting pemerintah Pusat dalam rangka percepatan Pembangunan Nasional," jelas anggota DPRD Fraksi PKB, Tarmizi. ● pp

Pengisian Air Bendungan Karian, Kampung Sinday Mulai Tenggelam

LEBAK (IM)- Air Sungai Ciberang mulai menggenangi Kampung Sinday, Desa Pajagan, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak seiring beroperasinya Bendungan Karian, pada tahun ini.

Diketahui, operasional Bendungan Karian dimulai saat Kementerian PUPR melakukan Impounding atau proses pengisian awal Waduk Karian pada 29 September 2023 lalu. Saat ini air Sungai Ciberang sudah dibendung dan sudah mulai menenggelamkan perkampungan warga yang sudah ditinggalkan.

Salah satu kampung yang sudah tenggelam tersebut, yakni Kampung Sinday, Desa Pajagan, Kecamatan Sajira. Air sungai Ciberang terbendung, sudah menenggelamkan sebagian rumah warga.

Warga Desa Pajagan, Hendri mengatakan, kampung yang tenggelam sudah terjadi pada Minggu (15/10) lalu, karena air sudah terbendung sehingga sudah menenggelamkan rumah warga yang

dekat dengan bantaran sungai. "Saat hujan turun, air sungai terus naik yang akhirnya kampung makin tenggelam. Sebelumnya tidak terlalu naik kalo sekarang sudah makin naik," katanya, Senin (16/10).

Disampaikan Hendri, saat ini warga yang tinggal di perkampungan Sinday sudah direlokasi dan dipindahkan ke tempat yang lebih aman. "Alhamdulillah untuk warga sudah pindah, ke tempat yang aman. Ada yang juga yang membeli rumah di daerah Rangkasbitung," ucapnya.

Untuk diketahui ada sekitar empat kampung mati yang sudah ditinggalkan warga pada tahun 2022 lalu. Warga meninggalkan kampung tersebut karena tempat tinggalnya masuk dalam proyek strategis nasional (PSN) Bendungan Karian.

Hal yang sama diungkapkannya Sopian, ribuan warga yang dulu tinggal di kampung Sinday, hanya bisa melihat air sungai secara perlahan-lahan menenggelamkan rumahnya. "Kalo sekarang ya gini,

kami hanya bisa melihat bangunan rumah yang mulai tenggelam. Memang belum semuanya tenggelam," ujarnya.

Diharapkan Sopian, semoga keberadaan Bendungan Karian dapat memberikan manfaat bagi warga sekitar khususnya di Kecamatan Sajira.

"Semoga dapat memberikan manfaat, bagi warga di Desa Pajagan. Khususnya bagi kesejahteraan masyarakat di sini," pungkaskannya.

Rencananya Bendungan Karian akan diresmikan Presiden Joko Widodo akhir Desember tahun ini. Bendungan Karian merupakan yang terbesar ketiga di Indonesia yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan air baku Jakarta dan Banten.

Keberadaan Bendungan Karian, akan digunakan dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak untuk mengendalikan banjir di wilayah Kota Rangkasbitung dan sekitarnya. ● pra



GERAKAN PANGAN MURAH DI SURABAYA

Warga membawa beras murah yang dibelinya saat Gerakan Pangan Murah di Surabaya, Jawa Timur, Senin (16/10). Pemkot Surabaya menggelontorkan 10.000 ton beras, 1,5 ton gula pasir, 1.300 pak minyak goreng dan bahan pangan lainnya yang dijual di bawah harga pasar dalam Gerakan Pangan Murah yang digelar oleh Pemerintah di berbagai kota/kabupaten secara serentak di Indonesia sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi.

Pemkab Tangerang Penuhi Kebutuhan Air Warga Terdampak Kekeringan

TANGERANG (IM)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Provinsi Banten memastikan memenuhi kebutuhan air bersih untuk warga di daerah itu yang terdampak kekeringan pada musim kemarau tahun ini.

Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, Moch Maesyal Rasyid di Tangerang, Senin (16/10), mengatakan pemenuhan kebutuhan air bersih itu wujud kehadiran negara di tengah kondisi kesulitan masyarakat.

"Distribusi air bersih sesuai dengan kebutuhan di wilayah dan kebutuhan di masyarakat di Kabupaten Tangerang karena musim kemarau masih kita alami. Tidak boleh berhenti sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah kecamatan masing-masing," katanya.

Ia menyebutkan distribusi air bersih bagi warga di beberapa wilayah setempat yang saat ini mengalami kekeringan itu, melalui Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pemukiman (DPPP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang, seluruh organisasi perangkat daerah.

Pihaknya juga mencerminkan pendamping di kecamatan-kecamatan terdampak bencana untuk bisa membantu upaya penanganan kekeringan secara lebih optimal.

"Saya meminta nanti dinas terkait untuk segera merindaklanjuti pendistribusian air bersih kepada masyarakat di wilayah-wilayah yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih itu," kata dia. Sebelumnya, BPBD Kabupaten Tangerang mencatat bencana kekeringan akibat dampak kemarau panjang di daerah itu, terus meluas hingga menyebar ke 16 kecamatan.

Kepala BPBD Kabupaten Tangerang, Ujat Sudrajat menyebutkan perluasan wilayah yang terdampak krisis air bersih tersebut, di antaranya Kecamatan Tigaraksa, Curug, Legok, Kronjo, Pakuhaji, Kresck, Kemer, Mauk, Kosambi, Panongan, Rajeg, Mauk, Gunung Kaler, Mekar Baru, Sindang Jaya, dan Sepatan.

"Berdasarkan data yang diterima saat ini wilayah atau titik dan lokasinya kekeringan/krisis air bersih mengalami perluasan hingga 16 kecamatan," katanya.

Seiring dengan meluas daerah yang terdampak kekeringan tersebut, BPBD Kabupaten Tangerang telah memperpanjang status tanggap darurat bencana kekeringan di daerah itu. "Dan Pos BPBD, yang berada di Kronjo, Mauk, Pakuhaji, Kosambi, Sepatan menerjunkan 16 mobil tangki dalam pemasokan air bersih," ujar dia. ● pp



PENENGGELOMAN KAMPUNG TERDAMPAK KEMARAU

Pengendara roda dua melintas di sekitar pemukiman yang tenggelam di Kampung Karian, Lebak Banten, Senin (16/10). Rencana penenggelaman kampung yang terdampak bendungan Karian yang ditargetkan pada September 2023 lalu tersebut masih belum terisi air akibat dampak kemarau.